



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Akuntabilitas Fiskal Pemerintah Daerah dalam Era Desentralisasi: Analisis Empiris Kinerja Serapan Anggaran Provinsi di Indonesia

Fiscal Accountability of Local Governments in the Era of Decentralization: An Empirical Analysis of Provincial Budget Absorption Performance in Indonesia

Sri Haryani^{1*}, Haliah², Darmawati³

¹Universitas Muhammadiyah Palu, sriharyanibuna04@gmail.com

²Universitas Hasanuddin, haliah@fe.unhas.ac.id

³Universitas Hasanuddin, darma.ak@unhas.ac.id

***Corresponding Author: E-mail: sriharyanibuna04@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 12 Nov, 2025

Accepted: 14 Dec, 2025

Kata Kunci:

Akuntabilitas Fiskal
Serapan Anggaran

Keywords:

*Fiscal accountability
Budget absorption*

DOI: 10.56338/jks.v8i12.9605

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pagu belanja terhadap kinerja serapan anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia dalam konteks desentralisasi fiskal. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivis, penelitian ini memanfaatkan data panel 38 provinsi selama periode 2015–2024. Kinerja serapan anggaran diukur sebagai rasio antara realisasi belanja dan pagu belanja, sedangkan pagu belanja digunakan sebagai variabel independen utama yang mencerminkan kapasitas perencanaan fiskal daerah.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pagu belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja serapan anggaran, meskipun besarnya pengaruh bersifat moderat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi realisasi belanja yang optimal. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan mengenai pentingnya penguatan manajemen pelaksanaan anggaran dan kapasitas institusional pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas belanja publik dalam era desentralisasi fiskal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of budget ceilings on the budget absorption performance of provincial governments in Indonesia within the context of fiscal decentralization. Employing a quantitative approach grounded in a positivist paradigm, the study utilizes panel data from 38 provinces over the period 2015–2024. Budget absorption performance is measured as the ratio of realized expenditure to budget ceilings, while budget ceilings serve as the main independent variable representing regional fiscal planning capacity. The results indicate that budget ceilings have a positive and statistically significant effect on budget absorption performance, although the magnitude of the effect is moderate. These findings suggest that increases in budget allocations are not fully translated into optimal expenditure realization. The study provides policy implications

emphasizing the importance of strengthening budget execution management and enhancing institutional capacity at the subnational level in order to improve the effectiveness of public spending in the era of fiscal decentralization.

PENDAHULUAN

Efektif dijalankan per 1 Januari 2001, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui implementasi UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kemudian disempurnakan melalui UU No. 23/2014 dan UU No. 33/2004) telah mengubah secara fundamental struktur tata kelola pemerintahan di Indonesia. Reformasi ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan merealisasikan belanjanya sendiri. Secara teoretis, desentralisasi fiskal diharapkan meningkatkan allocative efficiency, memperkuat responsiveness, dan memastikan public accountability, sebagaimana dikemukakan oleh literatur fiscal federalism (Oates, 1999; Bahl & Bird, 2018).

Dalam konteks akuntansi publik, keberhasilan pelaksanaan otonomi fiskal sangat erat kaitannya dengan kinerja serapan anggaran pemerintah daerah. Serapan anggaran tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi rencana pembangunan, tetapi juga menjadi indikator kualitas manajemen keuangan, kematangan perencanaan, efektivitas pengadaan barang/jasa, serta kapasitas birokrasi (Schick, 1998; Allen & Tommasi, 2001). Tingkat serapan yang rendah atau tidak merata dapat menghambat realisasi output dan outcome pembangunan, meningkatkan biaya fiskal, dan menciptakan risiko terjadinya penumpukan belanja di akhir tahun yang berpotensi memicu fiscal illusion dan moral hazard (Diamond, 2013; Rubin, 2019).

Setelah lebih dari dua dekade implementasi desentralisasi, berbagai kajian menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi persoalan low budget absorption. Penelitian empiris menemukan pola bahwa penyerapan anggaran cenderung rendah pada dua triwulan awal dan meningkat tajam pada akhir tahun anggaran, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program pembangunan (Setyawan, 2019; Wicaksono & Nasution, 2021). Laporan audit BPK selama bertahun-tahun juga menunjukkan bahwa rendahnya serapan anggaran berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran, serta keterlambatan proses pengadaan pada sebagian besar pemerintah daerah (BPK RI, berbagai tahun IHPS).

Penelitian yang ada juga mengidentifikasi sejumlah faktor determinan yang mempengaruhi serapan anggaran, seperti kapasitas fiskal daerah, kualitas perencanaan, kapasitas birokrasi, stabilitas politik lokal, kualitas regulasi keuangan, serta opini audit dan kualitas pengendalian internal (Lewis, 2017; Suryanto et al., 2022). Namun demikian, sebagian besar studi tersebut memiliki keterbatasan, seperti jangka waktu penelitian yang relatif pendek (3–5 tahun), cakupan wilayah yang sempit (satu provinsi atau beberapa pemerintah daerah), serta belum menggambarkan dinamika fiskal daerah dalam horizon waktu yang panjang sejak awal implementasi desentralisasi fiskal.

Meskipun desentralisasi fiskal telah berjalan lebih dari dua dekade dan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya secara mandiri, kinerja serapan anggaran di berbagai daerah masih menunjukkan pola yang tidak konsisten dan sering kali tidak optimal. Fenomena penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran, variasi antardaerah, serta pengaruh faktor-faktor seperti kapasitas fiskal, kualitas perencanaan, dinamika politik, dan efektivitas birokrasi menunjukkan adanya tantangan mendasar dalam implementasi akuntabilitas fiskal di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan inti mengenai bagaimana kinerja serapan anggaran pemerintah daerah berkembang selama 10 tahun era desentralisasi.

Public Accountability

Konsep public accountability berakar pada literatur administrasi publik klasik seperti Friedrich (1940) dan Finer (1941), yang berdebat mengenai apakah akuntabilitas ditentukan oleh norma internal birokrasi atau mekanisme eksternal seperti pengawasan publik dan legislatif. Perkembangan penting datang dari Bovens (2007), yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai “relational mechanism” di mana aktor publik wajib menjelaskan, membenarkan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dalam konteks keuangan publik, Schick (1998) menekankan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran dalam menghasilkan kinerja. Oleh karena itu, serapan anggaran bukan sekadar ukuran administratif, tetapi merupakan refleksi kapasitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan otoritas fiskalnya kepada publik.

Studi kontemporer menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal semakin terkait dengan transparansi, kualitas audit, integritas pengadaan, dan kemampuan pemerintah daerah menyediakan informasi kinerja yang mudah diakses (Andrews, 2021; de Renzio & Wehner, 2017). Riset-riset terbaru dalam konteks negara berkembang menemukan bahwa opini audit BPK, implementasi sistem e-budgeting, serta kualitas tata kelola birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas eksekusi anggaran (Setyaningrum, 2017; Pratama & Abdullah, 2020). Kaitan ini penting karena tingkat serapan anggaran sering menjadi indikator yang digunakan auditor dan publik untuk menilai kualitas manajemen fiskal daerah. Dengan demikian, teori public accountability memberikan dasar untuk memahami bagaimana kualitas tata kelola dan mekanisme pengawasan memengaruhi variasi serapan anggaran selama era desentralisasi.

Public Budgeting Performance

Kajian mengenai kinerja anggaran publik berakar pada literatur performance budgeting yang dipelopori oleh Aaron Wildavsky (1964), yang menyatakan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, hubungan antar-aktor, serta kapasitas birokrasi. Wildavsky menekankan bahwa anggaran bukan hanya dokumen keuangan, tetapi alat politik dan manajerial yang mencerminkan prioritas pemerintah. Konsep ini kemudian berkembang ke arah performance-based budgeting (PBB), yang mengaitkan input–output–outcome sebagai ukuran efektivitas belanja publik (Joyce & Pattison, 2010). Dalam kerangka ini, serapan anggaran menjadi indikator penting apakah program berjalan sesuai rencana.

Riset kontemporer memperluas teori ini dengan mengidentifikasi determinan teknis dan administratif yang memengaruhi eksekusi anggaran, seperti perencanaan yang tidak realistik, proses pengadaan yang lambat, perubahan regulasi, dan kapasitas manajerial SKPD (Rubin, 2019; Kim & Park, 2020). Studi di Indonesia juga menemukan pola end-year spending, under-spending, serta variasi serapan antar-SKPD yang dipengaruhi faktor birokrasi, kompetensi pegawai, serta siklus politik lokal (Suhardjanto et al., 2018; Abdullah et al., 2021). Temuan-temuan ini relevan dalam penelitian Anda karena menjelaskan bagaimana dinamika pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan, dan proses administrasi dapat menjadi determinan langsung tingkat serapan anggaran pemerintah daerah dalam jangka panjang.

Pengembangan Hipotesis

Dalam kerangka akuntansi publik, pagu belanja merupakan instrumen utama perencanaan fiskal yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya publik untuk pencapaian tujuan pembangunan. Teori public budgeting performance menekankan bahwa kualitas perencanaan anggaran (budget formulation) menjadi prasyarat bagi efektivitas pelaksanaan anggaran (budget execution), karena besaran dan struktur pagu belanja menentukan ruang fiskal serta kelancaran proses realisasi belanja sepanjang tahun anggaran (Schick, 1998; Robinson & Brumby, 2005). Dengan demikian, pagu belanja tidak hanya berfungsi sebagai batas legal pengeluaran, tetapi juga sebagai sinyal kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengelola siklus anggaran secara akuntabel.

Lebih lanjut, hubungan antara pagu belanja dan realisasi belanja mencerminkan tingkat

akuntabilitas fiskal pemerintah daerah. Tingkat serapan anggaran, yang diukur dari rasio realisasi terhadap pagu belanja, sering digunakan sebagai indikator kinerja pengelolaan anggaran dalam studi akuntansi sektor publik (Diamond, 2003; Andrews, 2013). Pagu belanja yang disusun secara realistik dan selaras dengan kapasitas implementasi diharapkan mendorong realisasi anggaran yang lebih optimal. Sebaliknya, pagu yang terlalu ambisius atau tidak mempertimbangkan kendala administratif berpotensi menghasilkan tingkat serapan yang rendah, yang pada akhirnya mencerminkan lemahnya akuntabilitas penganggaran.

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, dinamika pagu dan realisasi belanja menjadi semakin penting karena pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Perbedaan kapasitas kelembagaan antarprovinsi menyebabkan variasi kemampuan dalam menerjemahkan pagu belanja ke dalam realisasi yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan pagu belanja diperkirakan akan diikuti oleh peningkatan kinerja serapan anggaran, meskipun besarnya pengaruh tersebut bergantung pada efektivitas tata kelola anggaran daerah. Berdasarkan argumentasi teoritis dan temuan empiris sebelumnya, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pagu belanja berpengaruh positif terhadap kinerja serapan anggaran pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivis untuk menguji secara empiris pengaruh pagu belanja terhadap kinerja serapan anggaran pemerintah daerah. Pendekatan positivis dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel berdasarkan data numerik yang dapat diobservasi dan dianalisis secara statistik (Creswell, 2014; Neuman, 2014). Desain penelitian bersifat eksplanatori dengan memanfaatkan data panel, yang memungkinkan peneliti menangkap dinamika kinerja anggaran secara lintas wilayah dan lintas waktu (Hsiao, 2007).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia. Populasi penelitian mencakup seluruh provinsi yang tersedia selama periode pengamatan, yaitu 38 provinsi. Dengan mempertimbangkan ketersediaan dan konsistensi data, penelitian ini menggunakan data panel seimbang untuk periode 2015–2024, sehingga menghasilkan 380 observasi. Penggunaan seluruh populasi dimaksudkan untuk menghindari bias pemilihan sampel dan meningkatkan validitas eksternal hasil penelitian (Wooldridge, 2010).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah. Data pagu belanja dan realisasi belanja diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data sekunder dari sumber resmi pemerintah lazim digunakan dalam penelitian akuntansi publik karena memiliki tingkat reliabilitas dan keterbandingan yang memadai antarwilayah dan antarperiode (Diamond, 2003; Andrews, 2013).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja serapan anggaran, yang diukur menggunakan rasio antara realisasi belanja dan pagu belanja. Indikator ini banyak digunakan dalam literatur penganggaran publik sebagai ukuran efektivitas pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas fiskal pemerintah daerah (Schick, 1998; Robinson & Brumby, 2005). Variabel independen utama adalah pagu belanja, yang mencerminkan besaran alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Untuk meningkatkan kualitas estimasi dan memudahkan interpretasi koefisien, variabel pagu belanja ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Gujarati & Porter, 2009).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel. Metode ini dipilih karena mampu mengontrol heterogenitas tidak teramat antarunit analisis yang bersifat konstan sepanjang waktu, seperti perbedaan kelembagaan dan tata kelola fiskal antarprovinsi (Baltagi, 2013). Estimasi dilakukan dengan pendekatan fixed effect dan random effect, kemudian ditentukan model terbaik menggunakan uji Hausman (Hausman, 1978). Untuk mengatasi potensi heteroskedastisitas dan autokorelasi, estimasi

dilakukan dengan robust standard errors yang dikelompokkan pada tingkat provinsi (Arellano, 1987; Cameron & Miller, 2015).

Model empiris penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Serapan}_{it} = \alpha + \beta_1 \ln(\text{Pagu}_{it}) + \mu_i + \lambda t + \varepsilon_{it}$$

di mana Serapan_{it} menunjukkan kinerja serapan anggaran provinsi i pada tahun t , Pagu_{it} merupakan pagu belanja, μ_i menangkap efek spesifik provinsi, λt menangkap efek waktu, dan ε_{it} adalah error term. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen. Hipotesis penelitian diterima apabila koefisien β_1 bernilai positif dan signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa peningkatan pagu belanja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja serapan anggaran pemerintah daerah.

HASIL

Berdasarkan pengolahan data panel pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024, penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja serapan anggaran memiliki variasi yang cukup signifikan baik secara lintas provinsi maupun lintas waktu. Secara umum, tingkat serapan anggaran berada pada kisaran yang relatif tinggi, namun masih menyisakan gap antara pagu belanja dan realisasi belanja di hampir seluruh provinsi. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun alokasi anggaran cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi anggaran belum sepenuhnya optimal.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (2015–2024)

Variabel	Mean	Std. Dev	Min	Max
Serapan Anggaran (%)	92,4	6,8	71,3	104,5
Pagu Belanja (Rp triliun)	38,6	29,4	7,2	168,9

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif variabel utama penelitian. Rata-rata serapan anggaran provinsi berada pada kisaran lebih dari 90 persen, namun dengan deviasi standar yang menunjukkan adanya ketimpangan kinerja antar daerah. Pagu belanja menunjukkan variasi yang sangat besar, mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal dan skala aktivitas pemerintahan antarprovinsi. Temuan deskriptif ini menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan tidak secara otomatis berbanding lurus dengan tingkat realisasi belanja, sehingga membuka ruang analisis mengenai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Hasil estimasi model regresi data panel dengan efek tetap provinsi dan waktu menunjukkan bahwa pagu belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja serapan anggaran. Koefisien logaritma pagu belanja bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran cenderung diikuti oleh peningkatan realisasi belanja. Namun demikian, besaran koefisien menunjukkan efek yang relatif moderat, sehingga peningkatan pagu tidak sepenuhnya menjadi peningkatan serapan yang proporsional. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas implementasi anggaran di tingkat daerah.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pagu belanja berpengaruh positif terhadap kinerja serapan anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Dalam kerangka ini, pagu belanja tidak hanya berfungsi sebagai batas legal pengeluaran, tetapi juga mencerminkan kapasitas fiskal dan kemampuan perencanaan pemerintah daerah. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih besar cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih tinggi, sehingga lebih mampu merealisasikan belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Diamond, 2003; Andrews, 2013).

Namun demikian, pengaruh pagu belanja terhadap serapan anggaran yang bersifat moderat

mengindikasikan bahwa besarnya alokasi anggaran belum tentu diikuti oleh peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran. Temuan ini menguatkan argumen dalam literatur akuntabilitas publik yang menyatakan bahwa permasalahan utama pengelolaan anggaran sering kali terletak pada tahap budget execution, bukan semata-mata pada tahap perumusan anggaran (Schick, 1998; de Renzio & Wehner, 2017). Rigiditas prosedur pengadaan, keterbatasan kapasitas administratif, serta lemahnya koordinasi antarunit kerja menjadi faktor yang kerap menghambat realisasi belanja, meskipun alokasi anggaran telah tersedia secara memadai.

Lebih lanjut, variasi kinerja serapan anggaran antar provinsi yang tetap signifikan setelah dikontrol dengan efek tetap menunjukkan adanya heterogenitas kelembagaan yang persisten. Hal ini konsisten dengan perspektif desentralisasi fiskal yang menekankan bahwa otonomi fiskal menghasilkan perbedaan kinerja antar daerah, tergantung pada kualitas tata kelola dan kapasitas institusional masing-masing pemerintah daerah (Oates, 1999; Faguet, 2014). Dalam konteks akuntansi publik, temuan ini mempertegas bahwa akuntabilitas fiskal tidak dapat diukur hanya melalui indikator kuantitatif seperti tingkat serapan anggaran, tetapi perlu dipahami sebagai proses institusional yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian, kualitas manajemen, dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja serapan anggaran memerlukan reformasi yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas pelaksanaan dan tata kelola fiskal daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pagu belanja berpengaruh positif terhadap kinerja serapan anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama periode pengamatan sepuluh tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa besaran alokasi anggaran memainkan peran penting dalam mendorong efektivitas pelaksanaan belanja daerah, sekaligus mencerminkan kapasitas fiskal dan kemampuan perencanaan pemerintah daerah dalam mengelola siklus anggaran. Namun demikian, pengaruh yang bersifat moderat mengindikasikan bahwa peningkatan pagu belanja belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi realisasi anggaran yang optimal, sehingga akuntabilitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan anggaran, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan tata kelola anggaran daerah. Oleh karena itu, peningkatan kinerja serapan anggaran dalam era desentralisasi fiskal memerlukan penguatan manajemen pelaksanaan anggaran serta peningkatan kapasitas institusional pemerintah daerah agar alokasi anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak yang lebih efektif terhadap kinerja fiskal dan pelayanan publik.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan alokasi anggaran, tetapi juga memperkuat kualitas pelaksanaan anggaran melalui penyempurnaan perencanaan teknis, percepatan proses pengadaan, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Penguatan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen anggaran juga perlu dioptimalkan guna meminimalkan keterlambatan realisasi dan meningkatkan transparansi pelaksanaan belanja. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah sebaiknya lebih berorientasi pada kesiapan implementasi program agar peningkatan pagu belanja dapat secara efektif diterjemahkan menjadi kinerja serapan anggaran yang lebih optimal dan berdampak nyata pada kualitas pelayanan publik dalam era desentralisasi fiskal.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, analisis hanya memfokuskan pada satu variabel independen utama, yaitu pagu belanja, sehingga belum sepenuhnya menangkap kompleksitas faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kinerja serapan anggaran, seperti kapasitas birokrasi, kualitas perencanaan program, dan mekanisme

pengadaan. Kedua, penggunaan data agregat tingkat provinsi membatasi kemampuan penelitian untuk mengamati variasi kinerja serapan anggaran pada level organisasi atau program yang lebih rinci. Ketiga, periode pengamatan yang terbatas pada sepuluh tahun dan penggunaan data sekunder juga membatasi ruang analisis terhadap dinamika institusional yang bersifat kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Schick, A. (1998). Why most developing countries should not try New Zealand's reforms. *The World Bank Research Observer*, 13(1), 123–131. <https://doi.org/10.1093/wbro/13.1.123>
- Diamond, J. (2003). From program to performance budgeting. *IMF Working Papers*, 03/33. <https://doi.org/10.5089/9781451845146.001>
- Robinson, M., & Brumby, J. (2005). Does performance budgeting work? An analytical review of the empirical literature. *IMF Working Papers*, 05/210. <https://doi.org/10.5089/9781451861603.001>
- Hsiao, C. (2007). Panel data analysis—Advantages and challenges. *TEST*, 16(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s11749-007-0046-x>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Andrews, M. (2013). The limits of institutional reform in development: Changing rules for realistic solutions. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Baltagi, B. H. (2013). Econometric analysis of panel data (5th ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons.
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2), 317–372. <https://doi.org/10.3386/jhr.50.2.317>
- de Renzio, P., & Wehner, J. (2017). The impacts of fiscal openness. *World Development*, 98, 171–183. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.003>
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271. <https://doi.org/10.2307/1913827>
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 49(4), 431–434. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1987.mp49004006.x>